



Tekan Penyimpangan dengan e-Audit

Gubernur: Manusianya juga Harus Baik

JAKARTA -- Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi, kabupaten maupun kota terus ditekan. Salah satunya dengan program elektronik audit atau e-audit yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. "Ini merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran," kata Ketua BPK



NASIR HUMPROV FOR PONTIANAK POST

TANDATANGAN: Gubernur Kalbar Drs.Cornelis MH didampingi ketua BPK RI dan BPK RI Perwakilan Kalbar menanda tangani Nasaka Kesepakatan Kerjasama e- Audit akses data secara Online.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

Tekan Penyimpangan dengan e-Audit

Sambungan dari halaman 1

Hadi Poernomo, Rabu (16/4). Hal ini diungkapkan Hadi saat Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Maluku, dan Maluku Utara secara online pada PT BPD Kalbar, PT BPD Maluku, dan Bank-Bank Lainnya, dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah.

Dalam kesempatan itu hadir Gubernur Kalbar Cornelis, Wali Kota Pontianak Sutarmidji, Bupati Kubu Raya Rusman Ali, Bupati Mempawah Ria Norsan. Kemudian Wali Kota Singkawang Awang Ischak, Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot, Bupati Sanggau Paulos Hadi, Bupati Sekadau Simon Petrus. Bupati Sintang Milton Crosby, Bupati Melawi Firman Muntaco, Bupati Kapuas Hulu M Nasir. Serta Bupati Kayong

Utara Hildi Hamid dan Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun.

Penandatanganan dimulai oleh Gubernur yang disaksikan Hadi. Kemudian diikuti oleh Direktur Utama Bank Kalbar Sudirman HMY, dan diikuti 11 bupati, dua wali kota dan satu wakil bupati se-Kalbar. Dijelaskan Hadi, alam sistem e-audit ini nantinya data keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah, BUMN, BUMD akan masuk ke pusat data BPK. Nantinya, BPK akan melakukan monitoring dan mengolah data itu. "Ini merupakan upaya preventif," kata Hadi.

Nah, diakuinya, untuk mendapatkan atau mengetahui aliran dana juga tidak mudah dilakukan BPK. Karenanya, BPK minta dukungan untuk bisa melakukan monitoring. "Ini saling berhubungan. Kalau tidak berhubungan tidak mungkin bisa," kata Hadi. Dijelaskan Hadi, banyak orang bertanya apa pentingnya kesepakatan ini. Ia menjelaskan, negara ini sebenarnya kaya

namun masyarakat belum sejahtera. "Ini karena korupsi. Apa sebab korupsi? Korupsi terjadi karena dua hal ; kesempatan dan niat," katanya. Nah, ia menambahkan, kalau sudah karena niat maka BPK tidak bisa ikut campur. "Itu urusan hati masing-masing, tidak bisa dimonitor," kata bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ini.

Namun, ia menambahkan, kalau karena kesempatan itu masih bisa dicegah. Karenanya, Hadi mengajak untuk menutup kesempatan siapapun melakukan penyimpangan keuangan negara atau korupsi. Hadi menambahkan, BPK diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk menarik data-data dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN bahkan BUMD. Hal itu untuk mengetahui aliran transaksi secara transparan. "Setelah itu tentu kita tarik untuk mengetahui dua hal dari pemda yakni satu aliran aliran data satu lagi aliran uang," katanya.

Dalam kesempatan itu,

Cornelis menyatakan bahwa perlu juga memproteksi teknologi dari kejahatan. Sebab, kata dia, jangan sampai data-data maupun uang yang disimpan di bank pemerintah bisa dicuri. "Jangan sampai uang kita di BPD dicuri. Karena data kita masuk ke satelit orang. Ada hal yang perlu kita protect, kita jaga agar uang kita atau data tidak mudah diambil," kata Cornelis. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu pun menambahkan diperlukan information technology forensic agar server tidak mudah dibuka atau dihancurkan. Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang ini.

Karenanya, bekas Bupati Landak, itu mengatakan selain teknologi yang digunakan, kualitas manusianya juga penting. Menurutnya, faktor manusia sangat menentukan agar kesalahan tidak terulang terus. "Karena faktor manusialah yang menjadi pengendalinya," kata ayah Anggota DPR Karolin Margret Natasha ini. (ody)